

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

7

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Enam Pejabat Dinas PUPR Lampura Diperiksa Kejaksanaan

Terkait Proyek Jalan 3,9 Miliar

KOTABUMI - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) memeriksa enam pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait proyek pembangunan jalan di Kecamatan Abung Selatan tahun 2019

dengan anggaran Rp3,9 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampura Hafiedz saat dihubungi tadi malam menjelaskan pemeriksaan enam pejabat Dinas PUPR tersebut dilakukan oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lampura. "Memang ada enam pegawai Dinas PUPR Lampura yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Terkait hasil pemeriksaan masih kami

dalam," kata Hafiedz, Rabu (13/1).

Menurut Hafiedz, keenam pejabat Dinas PUPR Lampura tersebut masih dalam tahap dimintai keterangan terkait proyek pembangunan jalan di Abung Selatan tahun 2019 dengan anggaran Rp3,9 miliar. "Akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap keenam pejabat Dinas PUPR tersebut, namun belum ada jadwal

resminya," ujar Hafiedz.

Sayangnya, dari enam pejabat yang diperiksa tersebut Hafiedz enggan membeberkan identitasnya tersebut. Namun enam pejabat Dinas PUPR Lampura yang diperiksa itu mulai dari pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga kepala bidang (kabid) terkait proyek pembangunan jalan itu. Terpisah, Kadis PUPR Lampura, Syahrizal Adhar

membenarkan pemanggilan enam pejabatnya. "Iya benar, ada pemeriksaan atas enam pejabat PUPR Lampura terkait proyek 2019" jelas Syahrizal. Terkait nama-nama pejabat yang diperiksa Kejari, Syahrizal mengaku kurang mengetahui secara persis. "Saya juga kurang jelas, yang saya tahu PPTK, PPK dan Kabid yang menangani proyek tersebut," tandasnya. (ozy/cl/nca)